BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebut “SAKIP” yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kominfo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dalam hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kominfo Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Dinas

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Kebutuhan sistem dalam layanan publik di Kota Pekalongan
2. Kebutuhan integrasi sistem agar kecepatan dan keakuratan data dalam layanan publik terpenuhi.

3. Kebutuhan keamanan dan persandian dalam informasi dan komunikasi.
4. Kebutuhan teknis layanan jaringan dalam komunikasi informasi
5. Kebutuhan satu data se Indonesia
6. Kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik
7. Kebutuhan peningkatan kualitas desiminasi informasi yang menjadi tuntunan masyarakat dan pemersatu bangsa

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika disingkat Dinkominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan Dinkominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. pengkoordinasian pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. pengkoordinasian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
5. pengkoordinasian pelayanan informasi publik dan penyediaan konten lintas sektoral;
6. pengkoordinasian pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah dan pelayanan hubungan media di daerah;
7. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
8. pengkoordinasian layanan komunikasi intra pemerintah daerah kota dan layanan infrastuktur dasar data *center, disaster recovery center* & Teknologi Informatika Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
9. pengkoordinasian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
10. pengkoordinasian layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan daerah;
11. pengkoordinasian layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota;
12. pengkoordinasian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan tingkat kota;
13. pengkoordinasian pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat dan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kota serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;
14. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
15. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan,

pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

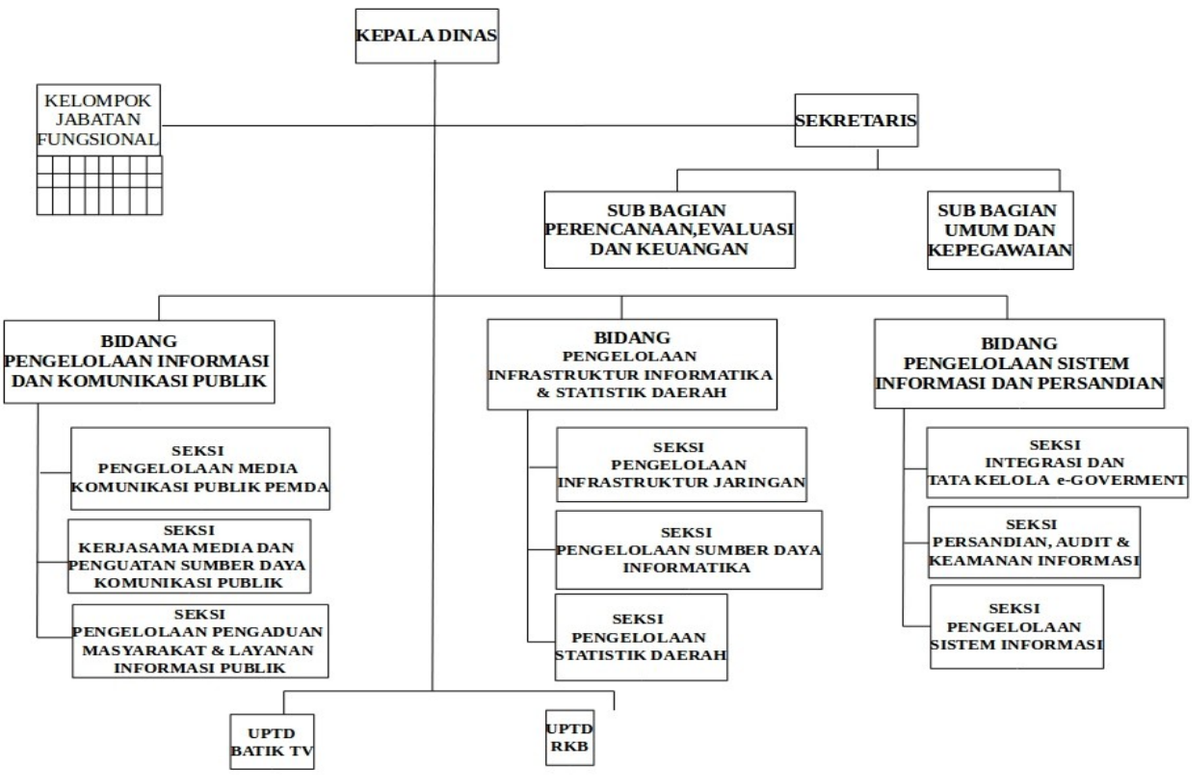

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

D. **Isu Strategis**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang.
2. Optimalisasi media komunikasi publik Pemda, hubungan media, koordinasi diseminasi dan pelayanan informasi antar OPD, dan kapasitas serta peran serta sumber daya komunikasi publik berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas E-Literasi (Melek TIK) masyarakat dan peran serta komunitas dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK, serta Kapasitas dan kelembagaan SDM Teknis Pengelola TIK (Infrastruktur Jaringan, DataCenter dan Aplikasi/ SIM) Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi
5. Telahaan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pekalongan serta mendukung tercapainya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

6. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam Rencana Strategis 2016-2021 merupkan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
7. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

RPJMD yang telah ditetapkan melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mengalami perubahan disesuaikan dengan RPJMD Kota Pekalongan sekaligus menyederhanakan indikator kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

   Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah : **“TERWUJUDNYA KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN NILAI-NILAI RELIGIUSITAS”.**

2. Misi

   Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota PekalonganTahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

   1) Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
   2) **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat;**
   3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;

5) **Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;** dan

6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengemb

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinam-bungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 10 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kominfo. Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Kominfo Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kemampuan Komunitas dalam peman-faatan TI sebagai salah satu Upaya Pemberdayaa n		Persentase TI yang dikembang kan dan dimanfaatkan oleh Komunitas	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan Publik	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	50,00	78.95	100.00
		Meningkatnya Kemampuan Komunitas dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas	Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	20	25	30

B. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	2. Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen		∑ OPD dengan Nilai KIP kategori “Baik” =---------- x 100% ∑ OPD di Kota PEkalongan	APBD
15	Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas	1. Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	KElompok		∑ Kelompok masyarakat yang memanfaatkan TI =---------- x 100% ∑ Target Kelompok masya-rakat yang memanfaatkan TI	APBD

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Kominfo II Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Dinas Kominfo Kota Pekalongan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	83,0
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi KIP	Indeks	950,0
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Cakupan OPD dengan Nilai KIP kategori “Cukup Informatif/Baik”	Indeks	77.42
4	Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	66.67

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.113.890.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 475.593.000
3.	Program peningkatan peng.sistem pelaporan cap.kin&k	Rp. 48.000.000
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp. 39.907.000
5.	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Rp.1.891.600.000
6.	ProgramOptimalisasi Penguatan Teknologi informasi	Rp.1.504.500.000
7.	Program Pengelolaan Deseminasi Informasi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 3.399.525.000
8.	Program Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dan penguatan KIP	Rp. 678.000.000
9.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 270.500.000
10.	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan	Rp. 324.000.000
	Jumlah	Rp.9.745.515.000

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Perubahan RPJMD 2016-2021 sekaligus menerapkan cascading supaya terarah dan runtut sesuai jabatan diawali dengan tujuan dan sasaran (yang dimiliki oleh Kepala atau Eselon II) kemudian dijabarkan runtut sesuai dalam program (oleh Kepala Bidang atau Eselon III) dan dijabarkan ke kegiatan (oleh PPTK atau Eselon IV dst) semua permusuhan harus dijabarkan dan dipasang target dan laporan capaian dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :

B. Rekomendasi Bappeda Kota Pekalongan

1. Dalam menyusun LKJIP dan Renstra disarankan untuk membuat tabel panjang sebagai dasar penyusunan target dan laporan kinerja OPD.
2. Tabel panjang berisi Tujuan Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Misi RPJMD harus valid dan bisa menjadi pedoman penyusunan LKJIP selanjutnya.
3. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program sesuai dengan urutan hirarki tidak boleh menyebar harus mengkrucut sesuai kapasitas jabatan.
4. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program ada Indikator masing-masing yang tidak boleh sama karena sesuai urutan indikator, tujuan mencakup bisa lebih dari satu sasaran begitu pula indikator sasaran bisa lebih dari satu indikator program sehingga membentu kerucut
5. Tujuan dan Sasaran merupakan indikator Kepala OPD
6. Program (Outcome) merupakan indikator Bidang dan Sekretaris
7. Kegiatan (Output) merupakan indikator PPTK.

C. Rekomendasi Inspektorat Kota Pekalongan

1. Dalam penyusunan renja tahun anggaran 2020 untuk sesuai / selaras dengan Renstra Perangkat Daerah(penyajian program dan kegiatan)
2. ketiberkoordinasi dengan Bappeda untuk merevisi Renstra Dinkominfo Kota Pekalongan
3. Dalam penyusunan Renja sesuai/selaras dengan RKPD tahun 2020 terkait adanya
   - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
   - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
   - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
4. melengkapi form lokasi kegiatan pada Renja 2020 yang belum diisi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kominfo Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kominfo.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Tahun 2016

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).* Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kominfo Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel **3.1.**
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kominfo **Kota Pekalongan**
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase Teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	persen	100	83.33	Tidak Tercapai	

Analisis penghitungannya :
jumlah capaian aplikasi 12, yang terupdate 10 sehingga tercapai 10/12 x 100% = 83.33%
Berikut rincian aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan komunitas dari tahun 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

Tahun	Target	Capaian	Satuan	Keterangan
2017	100%	100%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. e-suratonline.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id
2018	100%	100%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. jawabanhoax.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id 6. tourism.pekalongankota.go.id 7.pkk.pekalongankota.go.id
2019	100%	83.33%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. jawabanhoax.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id 6. tourism.pekalongankota.go.id 7.pkk.pekalongankota.go.id 8. pekalonganmall.go.id 9. pasarbatik.pekalongankota.go.id 10. internetaman.pekalongankota.go.id 11. smartcity.pekalongankota.go.id 12. sipekan.pekalongankota.go.id

Dalam penentuan teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaat kan oleh komunitas tahun 2019 tercapai 10 aplikasi dengan target 20 aplikasi

A.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan.

Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian Indikator kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2019, sebagai berikut

Tabel **3.2.**
Capaian Indikator Kinerja sasaran
Dinas Kominfo **Kota Pekalongan**
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	persen	50	NA	Belum Tercapai	
2.	Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	20	21	tercapai	

Indikator

Dalam melaksanakan indikator Kinerja sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 menuju pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran. Tahun 2019 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua*)* indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Startegis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel **3.2**

Capaian Indikator Kinerja Kota Pekalongan

Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian				
						Th. 2019	Nas	Pro	Kab. Btg	Kab. Pkl
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	50	NA	NA	-	86.2	93.14	90.82
2	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunitas	Cakupan komunitas yg berdaya dalam memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	20	21	105	-	-	-	-

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas sebagai berikut :

Tabel **3.3**

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	1 sasaran
2	Sesuai Target	
3	Kurang Target	
4	Belum ada target	1 sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 (dua) kinerja Sasaran diatas, pencapaian target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel **3.4**

Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	1	1	NA				
2	Misi 5	1	1	105				

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	NA
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		
B.	Misi 5		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	105
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Perencanaan yang akan datang.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun yang sedang dilaksanakan
3. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
4. target akhir renstra.
5. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
6. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

8. Meningkatnya kualitas layanan publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya layanan informasi publik berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2019		%	Th 2018	%
			Target	Real		Real	
2.	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen	50	NA	NA	48.37	229

1. Daftar Nilai KIP OPD tiga tahun terakhir (2017 s/d 2019)

No	OPD	Th. 2017		Th. 2018		Th. 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Dindik	600	600	700	850	800	905
2	Dinkes	600	616	800	866	850	920
3	Dinarpus	600	700	850	639	900	790
4	Dindagkop UKM	600	341	700	492	800	700
5	Dindukcapil	600	591	800	841	850	720
6	Dinkominfo	600	719	850	882	900	967
7	Dinparbudpora	600	417	700	667	800	810
8	Dinperinaker	600	576	700	826	800	800
9	Dinperkim	600	710	850	460	900	750
10	Dinperpa	600	154	700	304	800	625
11	Dinsos P2KB	600	293	700	443	800	900
12	Dishub	600	574	700	824	800	850
13	DKP	600	606	700	856	800	830
14	DLH	600	197	700	347	800	625
15	DPMPPA	600	420	700	670	800	775
16	DPMPTSP	600	714	850	860	900	910
17	DPUPR	600	320	700	470	800	930
18	Bappeda	600	356	800	506	850	780
19	BKD	600	310	700	460	800	840
20	BKPPD	600	337	700	487	800	875
21	BPBD	600	303	700	453	800	650
22	Inspektorat	600	326	700	476	800	670
23	RSUD Bendan	600	620	700	870	800	940
24	Kesbangpol	600	270	700	420	800	630
25	Satpol PP	600	181	700	331	800	950
26	Setwan	600	286	700	436	800	600
27	Kec. Pkl. Barat	600	636	800	686	850	710
28	Kec. Pkl. Timur	600	272	800	422	850	645
29	Kec. Pkl. Utara	600	410	800	640	850	730
30	Kec. Pkl Selatan	600	565	800	815	850	740
31	Setda	600	326	700	476	800	575
	Organisasi	600	0	700	0	800	0
	Perekonomian	600	0	700	0	800	0
	Tata Pemerintah	600	0	700	0	800	0
	RT dan Perlengk	600	0	700	0	800	0
	Kesra	600	0	700	0	800	0
	Umum	600	0	700	0	800	0
	BPJ Dalbang	600	0	800	0	850	0
	Hukum	600	0	700	0	800	0
	Humas	600	0	700	0	800	0

2. Program dan kegiatan yang mendukung (anggaran dalam DPA)

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	359.000.000,-	354.889.300,-
2		Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPAS	75.000.000,-	70.676.500,-
3		Pengelolaan Call Center 112	244.000.000,-	238.505.000,-
		Jumlah	678.000.000,-	664.070.800,-

3. Faktor Pendukung dalam mencapai tujuan :

1. Dukungan Komitmen Walikota dalam kelangsungan pelaksanaan KIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
2. Adanya koordinasi antar OPD
3. Aktivasi Admin dalam pengelolaan data OPD berjalan lancar
4. Penyelenggaraan Pameran dan Pekan Interaktif Daerah (PPID)

4. Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan

1. setiap ada perubahan data untuk selalu mengingatkan anggota Tim PPID
2. Permohonan yang dimintak oleh pemohon terkadang belum tersedia sehingga membutuhkan koordinasi ke OPD untuk segera mencukupi

Tabel 3.7.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

No	Sasaran		Indikator	Satuan	KInerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	2	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen	50	NA	NA	Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dan penguatan KIP	678.000.00	664.070.800	97.94
			Capaian					Total	678.000.00	664.070.800	97.94
	TINGKAT EFISIENSI 2.06 %										
	TINGKAT EFEKTIFITAS 97.94 %										

Sasaran Strategis 2

15. Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2019		%	Th 2018	%
			Target	Real		Real	
15.	1. Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	Kelompok	20	21	105	15	100

1. Data jumlah komunitas yang mampu menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan dengan baik pada tiga tahun terakhir

Tahun	Target	Capaian	Satuan	Keterangan
2017	10	9	komunitas	1. Himpaudi 2. MI Pringlangu 3. SMKIN 4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 5. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 6. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 7. Relawan TIK 8. Open Source Software 9. Dewan TIK
2018	15	15	Komunitas	1. Himpaudi 2. MI Pringlangu 3. SMKIN 4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 5. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 6. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 7. Relawan TIK 8. Open Source Software 9. Kelurahan 10. Kecamatan 11. Dewan TIK 12. Puskomas 13. MGMP TIK 14. Animasi 15. Blogger
2019	20	21	komunitas	1. Himpaudi 2. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 3. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 4. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 5. Relawan TIK 6. Open Source Software 7. Dewan TIK 8. MGMP TIK 9. Animator 10. Blogger 11. Fotografer 12. Film 13. Catur Pilar 14. RW Net 15. BKR 16. PKK 17. Karangtaruna

				18. Lppar 19. Pecinta Domain 20. Formaci (Forum Masyarakat Anti Hoax Cinta NKRI) 21. RAPI

2. Program dan kegiatan yang mendukung (anggaran dalam DPA)

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemanfaatan teknologi informasi	Fasilitasi Penerepan legal software berbasis FOSS	Rp. 70.000.000,-	Rp. 59.273.000,-
2		Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang komunikasi dan infomratika	Rp. 50.000.000,-	Rp. 32.929.000,-
2		Pengembangan konten kreatif digital berbasis komunitas	Rp. 75.000.000,-	Rp. 70.676.500,-
3		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 100.000.000,-	Rp. 85.720.500,-
4		Fasilitasi Dewan TIK	Rp. 50.000.000,-	Rp. 33.432.000,-
5		Pemberdayaan komunitas dan Relawan TIK	Rp. 50.000.000,-	Rp. 33.666.000,-
		Jumlah	Rp. 395.000.000,-	Rp. 315.697.000,-

3. Faktor Pendukung dalam mencapai tujuan :

1. Komunitas Merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan sama

2. Komunitas yang terbentuk didukung oleh Pemerintah Kota dengan dibekali pelatihan IT

3. Komunitas yang terbentuk didorong kelangsungannya melalui kompetisi / lomba IT antar komunitas

4. Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan

1.Kurangnya kreatifitas komunitas

2. Seseorang terkadang menjadi lebih dari 1 keanggota Komunitas

Tabel 3.9.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas

No	Sasaran		Indikator	Satuan	KInerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
8	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunitas	2	Cakupan komuni-tas yang berdaya dalam peman-faatan teknologi informasi	Kelompok	20	21	105	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informatif	395.000.00	315.697.800	79.92
			Capaian					Total	395.000.00	315.697.800	79.92
	TINGKAT EFISIENSI 20.07 %										
	TINGKAT EFEKTIFITAS 79.92 %										

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPPA Dinas kominfo Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.9.745.515.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.687.344.423,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.14%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 1.058.170577,-. mencapai 10,86%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			664.070.800	97.94
1	Melebihi/Melampaui Target	1	NA		
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				
B.	Misi 2,			315.697.000	79.92
1	Melebihi/Melampaui Target	1	105		
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				

PRESTASI DAN PENGHARAPAN

Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berhasil meraih prestasi “penilaian Keterbukaan Informasi Publik“ dan Tahun 2019 meraih “Badan Publik Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam SK Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/KPTS/K1-JTG/XII/2019 tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019.

Untuk Kota Pekalongan : 92.08

Kabupaten Batang : 93.14

Kabupaten Pekalongan : 90.82

Gambar 4.0 Kota Pekalongan terpilih sebagai
Badan Publik Informasi Utama

Prestasi lain yang patut dibanggakan di Tahun 2019 Kota Pekalongan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementrian Menpan RB mendapat predikat SPBE “Baik” dengan indeks SPBE 3,14%

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang BAIK. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam tahun 2019 Dinas kominfo Kota Pekalongan menetapkan sebanyak dua(2) Indikator Kinerja Renstra sesuai RPJMD Perubahan Nomor 9 Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	capain
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	83,0	NA
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi KIP	Indeks	950,0	NA
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Cakupan OPD dengan Nilai KIP kategori “Cukup Informatif/Baik”	Indeks	77.42	NA
4	Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	66.67	105

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak empat indikator kinerja tersebut, secara umum telah mencapai sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.9.745.515.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.687.344.423,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.14%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 1.058.170577,-. mencapai 10,86%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan.

Pekalongan, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA DINKOMINFO PEKALONGAN

YOS ROSYIDI, SIP Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 196605161986031007

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Kota Pekalongan
City Of Crafts | Designated UNNESCO and Folk Art | Creative City in 2014

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019